

**PENGARUH PENDAPATAN ISLAM, PENGELOLAAN ZAKAT, DEWAN  
KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH  
DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

**Syarafina Zatalini**

NIM. 135020301111030

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih*

*Derajat Sarjana Ekonomi*



**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2017**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Pengaruh Pendapatan Islam, Pengelolaan Zakat, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Yang disusun oleh:

Nama : Syarafina Zatalini  
NIM : 135020301111030  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 21 April 2017 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI



1. Aulia Fuad Rahman, D.B.A., Ak., SAS  
NIP. 19740910 200212 1 001  
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ph.D., Ak.  
NIP. 19610630 198802 1 001  
(Dosen Penguji I)
3. Noval Adib, S.E., M.Si., Ph.D., Ak.  
NIP. 19721005 200003 1 001  
(Dosen Penguji II)



Malang, 21 April 2017

Ketua Jurusan



 Nurkholis, Ph.D., Ak., CA.  
NIP. 196607061991031001 

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH PENDAPATAN ISLAM, PENGELOLAAN ZAKAT, DEWAN  
KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH  
DI INDONESIA**

Yang disusun oleh:

Nama : Syarafina Zatalini  
NIM : 135020301111030  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Akuntansi Keuangan Syariah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Malang, 6 April 2017



Aulia Fuad Rahman, D.B.A., Ak., SAS  
NIP. 197409102002121001

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarafina Zatalini  
NIM : 135020301111030  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun berjudul:

**PENGARUH PENDAPATAN ISLAM, PENGELOLAAN ZAKAT, DEWAN  
KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH  
DI INDONESIA**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 6 April 2017

Pembuat Pernyataan,



Syarafina Zatalini  
NIM. 135020301111030

## **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Syarafina Zatalini  
NIM : 135020301111030  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah melaksanakan penelitian di Universitas Brawijaya, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**PENGARUH PENDAPATAN ISLAM, PENGELOLAAN ZAKAT, DEWAN  
KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH  
DI INDONESIA**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 April 2017



Aulia Fuad Rahman, D.B.A., Ak., SAS  
NIP. 197409102002121001

## **HALAMAN RIWAYAT HIDUP**

Nama : Syarafina Zatalini  
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 9 Juni 1995  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Dr. Sutomo, RT. 05/03, Ds. Pagotan  
Kec. Geger, Kab. Madiun, Jawa Timur  
No. HP : 085749209032  
Email : syarafina95@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

Sekolah Dasar	2001 – 2007	SDN Pagotan 02
SMP	2007 – 2010	SMPN 1 Geger
SMA	2010 - 2013	SMAN 1 Geger
Perguruan Tinggi	2013 - 2017	S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

### **Pendidikan Non Formal**

2013	Program “Excellent”
2013	Program “Effective English Convention Course” (EECC)
2015	Pelatihan SAP
2015	Pelatihan Akuntansi Keuangan Syariah

### **Pengalaman Organisasi dan Kepanitiaan**

2014	Staf Marketing acara “Islamic Children Festival”
2015	Staf Marketing acara “Islamic in Focus” FORSTILLING FEB UB
2015	Staf Marketing acara “Tabligh Akbar” FEB UB
2015	Staf Divisi Kesehatan PKK MABA 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

2015 - 2016      Staf Departemen Sosial dan Masyarakat FORSTILLING  
(Forum Studi Lingkar Islam) FEB UB

**Pengalaman Kerja**

2016              Program KKN-P di KAP Made Thomas Dewi (MTD),  
Dorowati Street 8, Malang

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya maka peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Islam, Pengelolaan Zakat, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia”**. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala maupun hambatan. Berbagai kendala dan hambatan dapat terselesaikan tanpa bantuan moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada mereka atas saran, bimbingan, petunjuk, serta motivasi yang diberikan guna membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak. Ungkapan ini saya sampaikan kepada:

1. Bapak Aulia Fuad Rahman, D.B.A., Ak., SAS, selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi yang selalu bersedia untuk meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi pengetahuan baru kepada peneliti.
2. Bapak Nurkholis, SE., M.Bus., PhD., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Bapak Abdul Ghofar, S.E., M.Si.,DBA.,Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Prof. Iwan Triuwono, SE., M.Ec., Ph.D., Ak dan Bapak Noval Adib, S.E., M.Si., Ph.D., Ak selaku Dewan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua, Bapak Darminto dan Ibu Indriyani atas semangat, motivasi, teladan, tenaga, dan do'a yang selalu diberikan untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Adik-adik tercinta, Safira Zata Amani dan Najmuddin Kafa Billah atas semangat, dukungan, dan do'a yang telah diberikan.



7. Sahabat tersayang, Ratna, Ria, Lisca, Rima, dan Meme yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun telah memberikan banyak dukungan atas penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai upaya perbaikan. Peneliti berharap semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca.

Malang, 1 Mei 2017

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori Keagenan .....	9
2.2 <i>Shariah Enterprise Theory</i> .....	10
2.3 Tata Kelola Perusahaan ( <i>Corporate Governance</i> ).....	11
2.3.1 Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	11
2.3.2 <i>Corporate Governance</i> Perbankan .....	14
2.3.3 Prinsip – Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	15
2.4 Kepatuhan Syariah ( <i>Shariah Compliance</i> ).....	17

2.5 Pendapatan Islam .....	21
2.6 Pengelolaan Zakat .....	22
2.7 Dewan Komisaris .....	23
2.8 Dewan Pengawas Syariah .....	23
2.9 Kinerja Keuangan.....	24
2.10 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis .....	26
2.10.1 Pengaruh Pendapatan Halal terhadap Kinerja Keuangan .....	27
2.10.2 Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Kinerja Keuangan .....	28
2.10.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan.....	30
2.10.4 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan .....	30
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian .....	32
3.2 Data Penelitian dan Sumbernya .....	34
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	34
3.3.1 Variabel Dependen.....	34
3.3.2 Variabel Independen .....	35
3.4 Perumusan Model .....	38
3.5 Metode Analisis Data.....	39
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	39
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.5.3 Uji Hipotesis .....	41
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Analisis Deskriptif .....	43
4.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Pendapatan Islam, Pengelolaan Zakat, dan Kinerja Keuangan (ROA) .....	43
4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Dewan Komisaris.....	44
4.1.3 Analisis Deskriptif Variabel DPS .....	44
4.2 Analisis Pengaruh Variabel Pendapatan Islam, Pengelolaan Zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap Variabel Kinerja Keuangan (ROA) .....	45
4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik .....	45

4.2.1.1 Asumsi Multikolinieritas.....	45
4.2.1.2 Asumsi Normalitas.....	46
4.2.1.3 Asumsi Heteroskedastisitas.....	47
4.2.1.4 Asumsi Autokorelasi.....	48
4.2.2 Pengujian Koefisien Determinasi.....	49
4.2.3 Pengujian Hipotesis.....	50
4.2.3.1 Uji Hipotesis Simultan.....	50
4.2.3.2 Uji Hipotesis Parsial.....	50
4.2.3.3 Model Empirik Regresi Linier Berganda.....	52
4.2.4 Pembahasan Hasil Hipotesis.....	53
4.2.4.1 Pengaruh Pendapatan Islam terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.....	54
4.2.4.2 Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.....	55
4.2.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.....	56
4.2.4.4 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	59
5.3 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia .....	2
Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Syariah .....	32
Tabel 3.2 Karakteristik Pengambilan Sampel .....	33
Tabel 3.3 Sampel Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif .....	43
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Dewan Komisaris.....	44
Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Dewan Pengawas Syariah.....	44
Tabel 4.4 Tabel Collinearity Statistics – Pengujian Multikolinieritas .....	46
Tabel 4.5 Tabel Kolmogorov Smirnov – Pengujian Normalitas.....	47
Tabel 4.7 Tabel Glejser Test – Pengujian Heteroskedastisitas .....	48
Tabel 4.8 Tabel Durbin Watson– Pengujian Autokorelasi .....	48
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	49
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Hipotesis .....	54

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Rerangka Pemikiran Teoritis.....	31
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Bank Umum Syariah .....	64
Lampiran 2 Data Pendapatan Islam (X1).....	65
Lampiran 3 Data Pengelolaan Zakat (X2) .....	66
Lampiran 4 Data Dewan Komisaris (X3) .....	67
Lampiran 5 Data Dewan Pengawas Syariah (X4).....	68
Lampiran 6 Data <i>Return On Assets</i> (ROA).....	69
Lampiran 7 Analisis Deskriptif .....	70
Lampiran 8 Pengujian Pengaruh Pendapatan Islam, Pengelolaan Zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap Kinerja Keuangan (ROA) .....	71
Lampiran 9 Asumsi Pengaruh Pendapatan Islam, Pengelolaan Zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap Kinerja Keuangan (ROA) .....	72

## **ABSTRAK**

# **PENGARUH PENDAPATAN ISLAM, PENGELOLAAN ZAKAT, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

**Oleh :**

Syarafina Zatalini

**Dosen Pembimbing :**

Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., DBA., Dr., Ak., SAS

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Variabel terikat adalah kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2011-2015. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 9 Bank Syariah dari total 12 Bank Syariah, unit analisis berjumlah 45 yaitu dari 9 bank yang memenuhi kriteria dikalikan dengan periode pengamatan selama 5 tahun. Metode analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan Islam yang meningkat, pengelolaan zakat yang baik, dan komposisi Dewan Pengawas Syariah yang sesuai aturan dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah. Sedangkan komposisi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan.

**Kata Kunci :** kepatuhan syariah, corporate governance, kinerja keuangan, pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah



## **ABSTRACT**

### **THE INFLUENCE OF ISLAMIC INCOME, ZAKAT MANAGEMENT, BOARD OF COMMISSIONERS, AND SHARIA SUPERVISORY BOARD ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKS IN INDONESIA**

By:  
**Syarafina Zatalini**

Supervisor:  
**Aulia Fuad Rahman, SE., M.Si., DBA., Dr., Ak., SAS**

The study aims to examine the influence of the independent variables consisting of Islamic income, alms (*zakat*) management, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board (*Dewan Pengawas Syariah*) on the dependent variable of financial performance of Islamic banks as measured over the Return of Assets (ROA). The research population is the entire Islamic banks in Indonesia during the period of 2011-2015. The samples are selected by purposive sampling method, and it is found that 9 out of 12 Islamic banks fulfill the criteria. 45 units (as resulted from the 9 banks multiplied by 5 years of the observation period) are analyzed by multiple regression analysis. The result of the study reveals that the rising Islamic income, good alms management, and the proper composition of the Sharia Supervisory Board increase the financial performance of the Islamic banks. The Board of commissioners, however, does not affect such a performance.

**Keywords:** Sharia compliance, corporate governance, financial performance, Islamic return, zakat management, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Return On Assets (ROA)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang mendasarkan pengelolaan dan operasionalnya pada prinsip syariah. Bank Syariah memiliki kegiatan utama yang sama dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. Sedangkan perbedaan antara Bank Syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip bagi hasil yang terdapat pada Bank Syariah sedangkan pada bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Munculnya konsep Bank Syariah ditandai dengan adanya Undang-Undang Perbankan Nasional no 7 tahun 1992 yang menyatakan dimungkinkan bagi bank untuk menjalankan sistem bagi hasil yang pada akhirnya berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Sehingga kemudian mulai muncul beberapa Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah di Indonesia.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir mulai memperlihatkan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari berdirinya beberapa Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun 2016, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia berjumlah 12 bank. Hal tersebut meningkat dari tahun 2010 dimana Bank Syariah yang terdaftar di BI hanya berjumlah 11 bank.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia**

<b>Jumlah Perbankan Syariah</b>	<b>Tahun</b>					
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Bank Umum Syariah	11	11	11	11	12	12
Jumlah Kantor	1401	1401	1745	1998	2151	1990
Unit Usaha Syariah	24	24	24	23	22	22
Jumlah Kantor	336	336	517	590	320	311
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	155	155	158	163	165	163
Jumlah Kantor	364	364	401	402	439	446

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2015

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah setiap tahun. Meskipun demikian, pada dua tahun terakhir terjadi penurunan jumlah unit usaha syariah. Keadaan tersebut dikarenakan beberapa unit usaha syariah lebih memilih untuk berdiri sendiri menjadi Bank Umum Syariah. Sedangkan untuk BPRS terjadi kenaikan jumlah kantor yang cukup konsisten dari tahun ke tahun.

Perkembangan jumlah perbankan syariah yang ada di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kinerja dari perbankan tersebut. Hal ini dikarenakan perbankan syariah diharapkan memiliki kinerja perusahaan yang berkualitas tidak hanya dilihat dari perkembangan kuantitas kantornya. Kinerja perbankan syariah salah satunya dapat dilihat dari segi ekonomi atau kinerja keuangannya. Kinerja keuangan yang terdapat pada Bank Syariah dapat diukur dengan melihat tingkat kesehatan finansial dan rasio profitabilitas dari Bank Syariah tersebut. Adapun penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah diatur dalam Surat Edaran BI No.

9/24/DPBS tanggal 30 Oktober 2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Meskipun jumlah Bank Syariah di Indonesia bertambah, namun kinerja perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat diketahui bahwa nilai laba bersih BUS dan UUS tahun 2014 mencapai Rp 1,79 triliun turun dari laba bersih tahun 2013 sebesar Rp 3,28 triliun. Sedangkan nilai ROA (*Return On Assets*) Bank Umum Syariah menurun menjadi 0,46% pada tahun 2014 dari 0,53% pada tahun 2013. Selain itu juga terjadi peningkatan NPF (*Non Performing Financing*) perbankan syariah dengan posisi NPF pada tahun 2013 sebesar 2,62% meningkat menjadi 4,33% pada tahun 2014.

Permasalahan yang terdapat pada perbankan syariah tersebut harus disertai dengan adanya perbaikan dalam hal kinerja perbankan syariah dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dalam bertransaksi di Bank Syariah. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat.

Berdasarkan kasus di atas, Falikhatun (2012) menjelaskan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Bank Syariah, yaitu kepatuhan syariah yang terdiri dari beberapa hal, yaitu: (1) investasi Islam, (2) pendapatan Islam, (3) pembiayaan bagi hasil, dan (4) kesejahteraan direksi-karyawan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keempat faktor di atas berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan Bank Syariah. Hal tersebut sejalan dengan adanya tuntutan perbankan syariah untuk menjaga kepatuhan syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Kepatuhan syariah yang terdapat pada Bank Syariah diatur dalam Pasal 1 No. 12 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam peraturan tersebut, Bank Syariah diwajibkan untuk mengacu pada prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI.

Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2016) menunjukkan bahwa pendapatan islam dan pengelolaan zakat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Bank Syariah. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten antara penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan pengaruh pendapatan Islam dan pengelolaan zakat terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.

Selain itu, pada kenyataannya Bank Syariah di Indonesia belum menjalankan prinsip syariah secara penuh. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febianto (2011) yang menunjukkan bahwa belum ada Bank Syariah di Indonesia yang 100% menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas perbankan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah oleh perbankan syariah masih harus terus ditingkatkan karena hal ini juga akan berdampak pada kinerja keuangan Bank Syariah. Kondisi tersebut menambah ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih dalam terkait dengan pengaruh kepatuhan syariah terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hameed et.al (2004) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Bank Syariah, yaitu: (1) indikator kepatuhan syariah (Investasi Islam, Pendapatan Islam, Pembiayaan Bagi Hasil, Pengelolaan Zakat), (2) indikator tata kelola perusahaan, dan (3) indikator sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja *Bahrain Islamic Bank* (BIB) lebih baik daripada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) karena kepatuhan syariah BIB lebih tinggi dibandingkan dengan BIMB.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengombinasikan faktor yang dikemukakan oleh Hameed (2004) dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2016). Sehingga, penelitian ini lebih berfokus untuk mengetahui pengaruh pendapatan Islam, pengelolaan zakat, dan tata kelola perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa kinerja keuangan Bank Syariah juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan tata kelola perusahaan atau sering disebut dengan *Good Corporate Governance* yang mencakup Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasojo (2015) yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Syariah yang diukur menggunakan rasio CAR, ROA, ROE, dan FDR. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Islam, Pengelolaan Zakat, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan Islam berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah pengelolaan zakat berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh pendapatan Islam terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh pengelolaan zakat terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan Bank Syariah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan masukan atau rujukan bagi kalangan akademis yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh kepatuan syariah dan *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada obyek penelitian sejenis.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini, praktisi dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah melalui peningkatan pendapatan Islam, pengelolaan zakat, dan *good corporate governance* terutama pada bagian Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara terperinci dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Telaah Pustaka**

Bab telaah pustaka berisi landasan teori yang mendasari penelitian, antara lain: teori keagenan, *shariah enterprise theory*, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), kepatuhan syariah (*shariah compliance*), pendapatan Islam,



pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), kinerja keuangan, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis, serta model konseptual.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini membahas mengenai populasi dan sampel penelitian, data penelitian dan sumbernya, definisi variabel penelitian, perumusan model, dan metode analisis data.

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi sistematika pembahasan hasil penelitian, antara lain: analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan pembahasan hasil hipotesis.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan merupakan teori yang dijadikan dasar adanya praktik bisnis saat ini. Teori keagenan ini mendeskripsikan adanya hubungan antara pihak *shareholder* selaku prinsipal dan pihak manajer selaku agen dalam melakukan praktik bisnis. Scott (2012:340) mendefinisikan teori agensi sebagai berikut :

*“Agency Theory is a branch of game theory that studies the design of contract to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interest would otherwise conflict with those of the principal”.*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa teori agensi merupakan suatu pengembangan dari suatu teori yang mempelajari desain kontrak yang mana agen akan bekerja atas nama prinsipal. Ketika keinginan mereka berbeda dan bertolak belakang maka akan timbul suatu konflik

Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Hubungan agensi ini dapat menimbulkan permasalahan akibat adanya informasi asimetris. Informasi asimetris tersebut dapat muncul akibat kepemilikan informasi yang tidak seimbang antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, pihak agen memiliki lebih banyak informasi terkait bisnis perusahaan dibandingkan pihak prinsipal yang tidak ikut secara langsung dalam mengelola bisnis perusahaan.

Informasi asimetris dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup terkait kinerja agen sedangkan di sisi lain pihak agen memiliki informasi yang cukup terkait kapasitas diri, lingkungan kerja, dan informasi internal perusahaan (Widyaningdyah, 2001).

Teori Keagenan ini juga menganggap bahwa agen memiliki sifat oportunistik dalam menjalankan tugasnya dengan berusaha memaksimalkan keuntungan sendiri. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan *corporate governance*.

## **2.2 Shariah Enterprise Theory**

Shariah Enterprise Theory merupakan suatu teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Sehingga teori ini dianggap lebih humanis dengan menerapkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Menurut Triyuwono (2012: 355), akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan.

*Shariah Enterprise Theory* menurut Slamet (Triyuwono, 2012: 356) merupakan aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Teori ini memiliki pandangan bahwa distribusi kekayaan tidak hanya untuk pihak yang berpartisipasi secara langsung dalam aktivitas operasi perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga mencakup pihak yang tidak berpartisipasi secara langsung. Sehingga teori ini lebih mengedepankan kemaslahatan baik bagi *stakeholders*, *stockholders*, masyarakat sekitar, maupun untuk lingkungan alam.

Adapun implikasi teori pada penelitian ini, perbankan syariah yang menerapkan prinsip Islam seharusnya juga melakukan operasi yang tidak hanya bertanggungjawab kepada pihak *stockholders* saja melainkan juga kepada masyarakat dan terutama kepada Allah SWT. Agar perbankan syariah tidak hanya berfokus pada pihak yang berkepentingan secara langsung atas aktivitas operasi, maka perlu adanya pemenuhan kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Ketika perbankan syariah patuh terhadap prinsip Islam, maka sejatinya perbankan tersebut juga ikut memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai dengan *Shariah Enterprise Theory*.

## **2.3 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)**

### **2.3.1 Pengertian *Corporate Governance***

*Corporate Governance* merupakan merupakan suatu sistem yang berguna untuk mengatur sekaligus mengendalikan organisasi atau badan usaha dengan harapan dapat memberikan kesejahteraan kepada semua stakeholder (Puspitasari, 2010). *Corporate Governance* ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah yang berkaitan dengan konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer perusahaan.

Sedangkan *Corporate Governance* didefinisikan oleh OECD sebagai sekumpulan hubungan antar pihak manajemen, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Sehingga *Corporate Governance* ini merupakan suatu kumpulan struktur perangkat yang dibentuk oleh perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan baik dan tepat sasaran. Indikator yang terdapat pada *Corporate Governance* terdiri dari beberapa indikator, yakni :

a. Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan Perseroan dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan seluruh *stakeholders*. Direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap Perusahaan Terbuka (PT) dan tetap berpegang pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

b. Dewan Komisaris

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Tertanggal 8 Desember 2014 (“POJK No.34”). Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG).

d. Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab untuk meninjau dan mengawasi pelaporan keuangan perusahaan dan untuk memberikan pengawasan lembaga auditor internal dan eksternal dan isu-isu terkait. Tugas utama Komite Audit adalah mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik

e. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan konstitusional ini berperan untuk mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham.

f. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/33/PBI/2009 Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan Bank Indonesia.

### 2.3.2 *Corporate Governance* Perbankan

Perbankan merupakan lembaga yang memiliki lebih banyak regulasi dibandingkan dengan industri lainnya dikarenakan bank merupakan lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana (Prasojo, 2015). Pelaksanaan *corporate governance* pada perbankan juga memiliki regulasi tersendiri sesuai Peraturan Bank Indonesia.

*Corporate governance* menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG di bank umum syariah dan unit usaha syariah mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan lima prinsip, yaitu prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam PBI tersebut juga dijelaskan mengenai pelaksanaan GCG bagi perbankan syariah dan unit usaha syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang menjadi dasar pengelolaan perbankan syariah tersebut.

*Corporate governance* pada perbankan menjadi suatu hal yang penting untuk diterapkan pada proses manajerial karena perbankan diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi *stakeholder* yang lebih tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi utama bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan tingkat risiko yang tinggi (Prasojo, 2015). Sehingga perbankan perlu memiliki sistem tata kelola yang efektif dan efisien dalam melaksanakan aktivitasnya agar mampu menjaga kualitas (*image*) perbankan di masyarakat.

### 2.3.3 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG di bank umum syariah dan unit usaha syariah terdapat lima prinsip GCG, yaitu:

#### a. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi termasuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu bagi masyarakat. Definisi transparansi dalam menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam menyediakan informasi yang material dan relevan serta dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2012), transparansi adalah unsur pengungkapan informasi secara tepat waktu, tepat, akurat, jelas, memadai, dapat diperbandingkan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat baik *shareholder* maupun *stakeholder*. Transparansi dalam perbankan sangat diperlukan untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen serta dapat menjalankan operasionalnya secara lebih profesional.

Sedangkan OECD (2004) menyatakan bahwa *corporate governance* yang baik harus menjamin adanya pengungkapan informasi mengenai kinerja



keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan secara akurat dan tepat waktu. Informasi yang disajikan tersebut harus sudah melalui proses audit dan disusun sesuai standar yang berlaku.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas merupakan berfungsinya komponen perusahaan sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing. Definisi akuntabilitas menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggungjawab yang menjadikan pengelolaan perbankan berjalan secara lebih efektif

Menurut KNKG (2012), akuntabilitas adalah adanya unsur kejelasan fungsi organisasi termasuk cara pertanggungjawabannya. Untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan dalam perbankan maka akuntabilitas ini sangat diperlukan mengingat bank sebagai lembaga keuangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus dapat mempertanggungjawabkan semua kinerjanya. Hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan bank yang profesional dan memenuhi kepentingan masyarakat.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Pertanggungjawaban menurut PBI No.11/33/PBI/2009 adalah kesesuaian antara pengelolaan bank, prinsip-prinsip pengelolaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut KNKG (2012), pertanggungjawaban adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan yang terdapat di internal perusahaan. Pertanggungjawaban tersebut juga berkaitan dengan tanggung

jawab yang harus dilakukan oleh bank kepada masyarakat sebagai nasabahnya.

d. Profesional (*professional*)

Profesional menurut PBI No.11/33/PBI/2009 adalah memiliki kompetensi untuk mampu bertindak secara obyektif, bebas, dan independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dalam mengembangkan perbankan syariah.

e. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip kewajaran menurut PBI No.11/33/PBI/2009 adalah keadilan dan kesetaraan yang berikan oleh perbankan dalam rangka memenuhi hak masyarakat sebagai nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut KNKG (2012), kewajaran adalah unsur perlakuan yang adil dengan memberikan hak yang sesuai dengan proporsinya kepada para *shareholder* maupun *stakeholder* berdasarkan pada asas kewajaran dan kesetaraan.

## 2.4 Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*)

Kepatuhan syariah diatur dan disusun oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) sebagai bagian dari tata kelola lembaga. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan atas seluruh prinsip-prinsip Islam yang menjadi karakteristik dari suatu lembaga termasuk lembaga syariah (Ilhami, 2009). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, kepatuhan syariah merupakan suatu pengawasan atas implementasi fatwa MUI yang kewenangannya berada pada

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS.

Perbankan syariah tidak hanya berfokus pada tata kelola perusahaan secara umum tetapi juga perlu berfokus pada pemenuhan prinsip Islam sesuai dengan aktivitas dan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Prinsip syariah sesuai dalam Pasal 1 No. 12 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI. Pemenuhan prinsip Islam tersebut sangat penting dilakukan mengingat masyarakat sudah mulai mengerti mengenai operasional lembaga syariah termasuk bank syariah dan unit usaha syariah. Hal tersebut dikarenakan bank syariah lebih mengedepankan pemenuhan prinsip Islam dalam operasionalnya dibandingkan bank umum lainnya. Sehingga pemeriksaan dan pengawasan terkait kepatuhan syariah yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan perlu untuk dilakukan.

Bank syariah dikatakan telah memenuhi dan patuh pada prinsip syariah apabila dalam semua transaksi dan kegiatannya terbebas dari adanya unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Faozan, 2015). Indikator-indikator kepatuhan syariah tersebut sebagai berikut :

1. Tidak terdapat *riba* dalam transaksi bank

Menurut Al-Jurjani dalam Faozan (2015), *riba* merupakan tambahan atau kelebihan pembayaran tanpa ada ganti maupun imbalan yang disyaratkan bagi salah satu pihak dalam transaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa *riba* merupakan tambahan atas adanya suatu transaksi tanpa adanya ganti sesuai

syariah. Perbankan dikatakan memenuhi kepatuhan syariah apabila bank tersebut tidak melakukan transaksi yang memunculkan riba atau pendapatan yang tidak sah dalam pertukaran barang maupun pinjam-meminjam antar pihak. Untuk melihat perbankan telah berhasil menerapkan prinsip dasar bank yaitu terbebas dari unsur riba, maka dapat menggunakan rasio investasi islam yang merupakan perbandingan dari investasi islam (halal) dengan seluruh investasi bank syariah baik yang halal dan non halal (Meilani, 2015).

2. Tidak terdapat *gharar* dalam transaksi bank

*Gharar* sesuai dengan Ilmu Fiqh adalah suatu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki oleh penjual, tidak dapat diserahkan, dan tidak diketahui keberadaanya. Transaksi dalam bank syariah yang dapat menimbulkan *gharar* adalah transaksi dengan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

3. Tidak terdapat *maisir* dalam transaksi bank

*Maisir* merupakan suatu transaksi yang tidak pasti (untung-untungan) dan bergantung pada suatu keadaan yang tidak diketahui kepastiannya (Faozan, 2015). Transaksi perbankan syariah tidak diperbolehkan terdapat unsur *maisir* di dalamnya untuk menghindari ketidakadilan dari salah satu pihak yang bertransaksi. Sehingga salah satu pencegahan agar tidak terdapat *maisir* maka nasabah harus memberikan laporan pendapatan usaha untuk diserahkan kepada bank syariah sebagai dasar penentuan pembagian keuntungan.

4. Bank menjalankan bisnis berdasarkan pada pendapatan halal

Perbankan syariah yang melekat dengan kata syariah seharusnya melakukan operasional sesuai dengan prinsip Islam yang mana pendapatan atau keuntungan yang diperoleh harus halal dan tidak mengandung *riba*, *gharar*, maupun *maisir*. Pada laporan keuangan bank syariah juga terdapat penjelasan terkait pendapatan halal yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang halal maka peran DPS sangat penting. DPS berperan sebagai pengawas kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip Islam salah satunya berkaitan dengan pendapatan halal bank.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah perbankan syariah sudah menerapkan bisnis yang berdasarkan pendapatan halal yaitu dengan menghitung rasio pendapatan halal. Rasio pendapatan halal merupakan rasio yang membandingkan antara pendapatan halal dengan pendapatan keseluruhan perbankan (Meilani, 2015).

5. Bank menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat juga perlu untuk memberikan timbal balik kepada nasabah atas kepercayaan yang diberikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk memastikan bahwa bank tersebut sudah amanah adalah dengan menjelaskan perolehan dan keuntungan dari pembiayaan yang dilakukan, meminta bagi hasil sesuai kesepakatan, dan mempublikasikan laporan keuangan kepada nasabahnya.

6. Bank mengelola zakat, *infaq*, dan *shadaqah* sesuai syar'i

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya juga wajib melakukan pengelolaan terkait zakat, *infaq*, dan *shadaqah*. Hal ini merupakan salah satu yang menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Hameed et al (2004) menyatakan bahwa kinerja bank Islam harus berdasarkan pembayaran zakat untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share*. Untuk mengetahui pengelolaan zakat, *infaq*, dan *shadaqah* tersebut dapat digunakan rasio pengelolaan zakat. Rasio pengelolaan zakat adalah perbandingan antara pengelolaan zakat yang didasarkan pada aktiva bersih perbankan syariah (Meilani, 2015).

## 2.5 Pendapatan Islam

Pendapatan bank syariah didapatkan dari produk-produk yang terdapat pada bank syariah tersebut. Sesuai pada PSAK No. 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah, sumber pendapatan bank syariah diperoleh dari pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional lainnya. Adapun pendapatan utama yang terdapat pada bank syariah adalah pendapatan jual beli (pendapatan margin *murabahah*, pendapatan bersih *salam* paralel, dan pendapatan bersih *istishna* paralel, pendapatan dari sewa (pendapatan bersih *ijarah*), pendapatan dari bagi hasil (pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *musyarakah*), dan pendapatan operasional utama lainnya.

Pada perbankan syariah, pendapatan yang diperoleh dibagi menjadi dua macam yakni, pendapatan Islam dan pendapatan non Islam (Hameed et al, 2004). Adapun yang telah dijelaskan sebelumnya termasuk dalam pendapatan Islam. Sedangkan

pendapatan non Islam (pendapatan non halal) adalah pendapatan bank syariah yang berasal dari pendapatan bunga dan denda atas kelalaian nasabah dalam membayarkan utangnya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan pendapatan Islam adalah pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional utama lainnya dari Bank Syariah yang berasal dari transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Adapun transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam pada Bank Syariah yaitu, pendapatan dari akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan pendapatan utama lainnya.

## **2.6 Pengelolaan Zakat**

Menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999, Tentang Pengertian, Asas, Tujuan dan Organisasi Pengelolaan Zakat; pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Adapun zakat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah harta-harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan atau aktivitas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi

pengumpulan, penyerahan, dan pendayagunaan zakat yang diterima dari masyarakat.

## **2.7 Dewan Komisaris**

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan menurut Syakhroza (2003), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris merupakan bagian dari perusahaan yang dibentuk untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Dewan Direksi serta menjamin pelaksanaan strategi perusahaan. Dewan Komisaris dibentuk dengan tujuan agar terlaksana akuntabilitas dalam perusahaan dan terciptanya pengawasan internal yang baik.

## **2.8 Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha bank syariah secara independen (Muhamad, 2011). Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 23 diatur tentang posisi DPS pada perbankan syariah yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha



syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang dibentuk pada bank syariah atau bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah dengan tujuan untuk memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

## **2.9 Kinerja Keuangan**

Menurut Sucipto (2003), pengertian kinerja keuangan yakni penentuan ukuran - ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara itu menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dikemukakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Sedangkan menurut Mulyadi (2007:2) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka menghasilkan laba bagi perusahaan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari keseluruhan penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien dengan tujuan

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Kinerja keuangan yang baik dapat dicapai ketika penggunaan sumber daya dilakukan secara maksimal dengan efektif dan efisien. Kinerja perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan berbagai macam indikator salah satunya dari laporan keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan pada perbankan erat dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank. Dalam UU RI No 7 Tahun 1992 pasal 29 tentang perbankan disebutkan bahwa Bank Indonesia berhak untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Sehubungan dengan peraturan tersebut, Bank Indonesia selanjutnya mengevaluasi Surat Edaran No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 yang ditujukan kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain menilai kinerja keuangan perbankan dengan melihat tingkat kesehatan bank, dapat juga dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang dimiliki perusahaan. Salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perbankan adalah rasio profitabilitas (Prasojo, 2015). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang paling tepat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perbankan. Rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai salah satu cara menilai kinerja keuangan perbankan karena rasio tersebut melihat pengelolaan aset dan modal yang dimiliki perusahaan oleh pihak manajemen perbankan.

Sehingga rasio ini berpatokan pada kinerja perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien.

## **2.10 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis**

Kinerja keuangan perbankan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah perbankan tersebut telah memiliki kinerja yang baik atau buruk. Berkaitan dengan kinerja keuangan, perbankan syariah juga menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) salah satunya untuk memperbaiki kinerja keuangan mereka. Pemberlakuan GCG pada perbankan syariah tersebut dimulai sejak diterbitkannya PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pemberlakuan GCG pada perbankan syariah juga harus diikuti dengan implementasi *shariah compliance* sesuai dengan penerapan prinsip Islam dalam aktivitas operasional perbankan.

Penilaian kinerja keuangan perbankan syariah juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturan OJK pasal 6 POJK No. 8/POJK.03/2014, kinerja keuangan perbankan dinilai dengan melihat 4 komponen yaitu *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, dan *capital*.

Kondisi kinerja keuangan perusahaan termasuk perbankan dapat dilihat melalui rasio-rasio keuangan salah satunya dengan melihat rasio profitabilitas perusahaan. Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk melihat laba yang dihasilkan perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara

efisien dan efektif. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghitung rasio profitabilitas, salah satunya dengan menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*).

ROA merupakan salah satu rasio yang baik untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan berkaitan dengan kinerja perusahaan. Hal tersebut dikarenakan ROA dapat digunakan untuk mengetahui laba bersih yang dihasilkan dengan memanfaatkan kekayaan perusahaan secara maksimal. Tinggi rendahnya ROA tergantung pada pengelolaan kekayaan atau aset perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. ROA yang tinggi dapat mengindikasikan efisiensi operasional perusahaan, sedangkan ROA yang rendah dapat mengindikasikan banyaknya aset perusahaan yang menganggur, operasional di bawah normal, dan lain-lain.

### **2.10.1 Pengaruh Pendapatan Halal terhadap Kinerja Keuangan**

Perbankan syariah dalam melakukan operasionalnya menggunakan prinsip Islam yang mengharuskan perbankan syariah untuk mendapatkan pendapatan dari aktivitas yang halal. Prinsip-prinsip syariah melarang adanya transaksi yang melibatkan riba, *gharar* dan perjudian tetapi lebih mendorong kepada adanya transaksi yang halal (Hameed et al, 2004). Perbankan syariah yang memiliki rasio pendapatan halal lebih tinggi dibandingkan dengan rasio pendapatan non halal dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank syariah. Hal tersebut dikarenakan nasabah akan beranggapan bahwa bank syariah memiliki *shariah compliance* yang baik dengan rasio pendapatan halal yang lebih besar.

Pendapatan halal atau juga disebut pendapatan Islam yang sesuai prinsip syariah dapat menghilangkan keraguan nasabah untuk mempercayai layanan

perbankan syariah (Antonio, 2012). Kepercayaan nasabah tersebut selanjutnya dapat berdampak pada penentuan keputusan untuk memilih melanjutkan transaksi pada bank syariah atau menghentikan transaksi pada perbankan syariah.

Kepercayaan nasabah terhadap bank syariah yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja keuangan. Jika pendapatan halal meningkat maka kemungkinan kinerja keuangan perbankan syariah juga ikut meningkat. Hal tersebut dapat terjadi karena pendapatan halal merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan nasabah yang memilih bank syariah.

Penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara pendapatan halal dengan kinerja keuangan antara lain Falikhatun (2012) dalam penelitiannya “Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan pada Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial” yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam salah satunya pendapatan halal (Islam) berpengaruh positif terhadap kesehatan finansial bank syariah. Selain itu penelitian Hameed et al (2004) yang membandingkan antara *Bahrain Islamic Bank* dengan *Malaysia Islamic Bank* dengan menggunakan indikator kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan, dan tata kelola sosial juga menunjukkan pengaruh positif pendapatan halal terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *Bahrain Islamic Bank* dengan tingkat kepatuhan yang tinggi memiliki kinerja lebih baik jika dibandingkan dengan *Malaysia Islamic Bank*.

**H1** : Pendapatan halal berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan.

### **2.10.2 Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Kinerja Keuangan**

Pengelolaan zakat merupakan salah satu hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Pada bank syariah terdapat pengelolaan zakat, *infaq*,

dan *shadaqah* yang dilakukan setiap tahun serta dilaporkan dalam laporan keuangan. Pengelolaan zakat tersebut berkaitan dengan pemenuhan *shariah compliance* yang dilakukan oleh perbankan syariah. Ketika perbankan syariah melakukan pengelolaan zakat dengan baik, diasumsikan nasabah akan memiliki kepercayaan kepada bank untuk menjadi sarana penyaluran dana sesuai dengan prinsip Islam.

Pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan menghilangkan keraguan nasabah untuk bertransaksi pada perbankan syariah (Antonio, 2012). Hal tersebut berkaitan dengan pemilihan keputusan nasabah untuk tetap melanjutkan pemanfaatan jasa pada perbankan syariah atau memilih untuk menghentikan pemanfaatan jasa pada perbankan syariah tersebut.

Pengelolaan zakat yang baik dapat berdampak pada meningkatnya kepercayaan nasabah. Ketika kepercayaan nasabah semakin tinggi untuk menyalurkan dana ke bank syariah maka kinerja keuangan bank syariah juga akan terkena dampaknya. Dampak yang ditimbulkan ketika kepercayaan nasabah meningkat dapat berujung pada meningkatnya kinerja keuangan perbankan syariah pada periode tertentu.

Penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara pengelolaan zakat dan kinerja keuangan antara lain Hameed et al (2004) pada penelitiannya yang membandingkan *Bahrain Islamic Bank* dan *Malaysia Islamic Bank* dengan menggunakan indikator salah satunya adalah pengelolaan zakat sebagai penilaian kepatuhan syariah. Selain itu, penelitian Sidik dan Reskino (2016) pada bank

syariah di Indonesia juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

**H2** : Pengelolaan zakat berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan.

### **2.10.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan**

Dewan komisaris merupakan salah satu indikator dalam *good corporate governance* pada perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang memberikan pengarahan kepada manajemen dan mengawasi tindakan manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Jumlah dewan komisaris yang semakin besar dapat menyebabkan mekanisme *monitoring* manajemen perusahaan akan semakin baik sehingga ukuran dewan komisaris akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa proporsi Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Proporsi Dewan Komisaris diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota Dewan Komisaris perusahaan.

**H3** : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan.

### **2.10.4 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan**

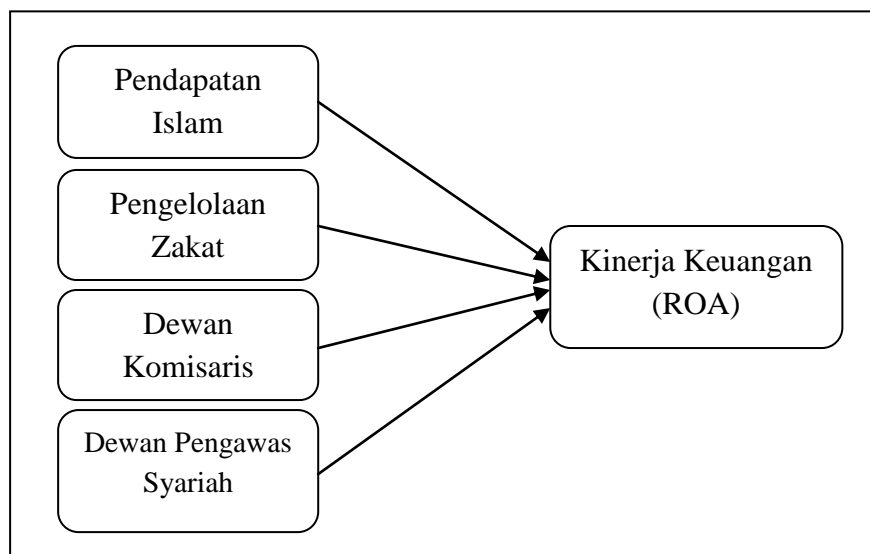
Variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu indikator yang terdapat pada *corporate governance* di perbankan syariah. DPS berfungsi sebagai pengawas pengelolaan bank syariah agar dapat menjalankan operasional dengan baik sesuai prinsip Islam. Ketika pengelolaan bank syariah dilakukan

dengan baik dan sesuai prinsip Islam, maka berdampak pada kinerja keuangan perbankan yang semakin baik.

Penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara ukuran DPS dengan kinerja keuangan antara lain Rama (2015) dalam hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA, NPF, dan CAR.

**H4** : Ukuran DPS berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, model rerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran Teoritis**



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi yang akan diamati pada penelitian ini adalah seluruh industri perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2011 sampai dengan periode 2015 yang melakukan publikasi laporan keuangan secara lengkap. Berikut ini disajikan daftar Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia sampai tahun 2015 :

**Tabel 3.1**

**Populasi Bank Umum Syariah**

Bank Umum Syariah	
1.	PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank Victoria Syariah
3.	PT. Bank Syariah BRI
4.	PT. Bank Jawa Barat Banten Syariah
5.	PT. Bank Syariah BNI
6.	PT. Bank Syariah Mandiri
7.	PT. Bank Syariah Mega Indonesia
8.	PT. Bank Panin Syariah
9.	PT. Bank Syariah Bukopin
10.	PT. BCA Syariah
11.	PT. Maybank Indonesia Syariah
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2015

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*. Metode ini mengharuskan sampel dipilih dengan mendasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan sebelumnya. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2011 sampai dengan periode 2015.
2. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap periode 2011 sampai dengan periode 2015.
3. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* periode 2011 sampai dengan periode 2015.

Ringkasan prosedur pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**

**Karakteristik Pengambilan Sampel**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
BUS yang terdaftar di BI berturut-turut selama periode 2011 sampai dengan 2015	60
BUS yang tidak masuk sebagai sampel :	
1. BUS yang tidak mempublikasikan laporan GCG periode 2011 sampai dengan 2015	0
2. BUS yang tidak mempublikasikan laporan tahunan periode 2011 sampai dengan 2015	15
<b>Total sampel pada periode yang diteliti</b>	<b>45</b>

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Berdasarkan karakteristik pengambilan sampel yang sudah dilakukan, terdapat 9 Bank Umum Syariah (BUS) yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sampel penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Sampel Penelitian**

Bank Umum Syariah		Website
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia	<a href="http://www.bankmuamalat.co.id">www.bankmuamalat.co.id</a>
2.	PT. Bank Victoria Syariah	<a href="http://www.bankvictoriasyariah.co.id">www.bankvictoriasyariah.co.id</a>
3.	PT. Bank Syariah BRI	<a href="http://www.brisyariah.co.id">www.brisyariah.co.id</a>
4.	PT. Bank Syariah BNI	<a href="http://www.bnisyariah.co.id">www.bnisyariah.co.id</a>
5.	PT. Bank Syariah Mandiri	<a href="http://www.banksyariahmandiri.co.id">www.banksyariahmandiri.co.id</a>
6.	PT. Bank Syariah Mega Indonesia	<a href="http://www.megasyariah.co.id">www.megasyariah.co.id</a>
7.	PT. Bank Panin Syariah	<a href="http://www.paninbanksyariah.co.id">www.paninbanksyariah.co.id</a>
8.	PT. BCA Syariah	<a href="http://www.bcasyariah.co.id">www.bcasyariah.co.id</a>
9.	PT. Maybank Indonesia Syariah	<a href="http://www.maybanksyariah.co.id">www.maybanksyariah.co.id</a>

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

### **3.2 Data Penelitian dan Sumbernya**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis data sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak ketiga melalui media perantara yaitu berupa laporan keuangan tahunan dan laporan GCG perusahaan yang diterbitkan oleh industri perbankan yang terdaftar di BI. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) dan dari alamat web resmi setiap perbankan syariah yang akan diteliti.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

#### 3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang terdapat pada penelitian ini adalah variabel kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka menghasilkan laba bagi perusahaan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk melihat kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. Rasio tersebut dapat dihitung dengan menggunakan berbagai macam cara, salah satunya menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. ROA lebih tepat untuk digunakan sebagai proksi kinerja keuangan karena pembagi dari ROA menggunakan aset atau sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sehingga dengan proksi ROA, dapat diketahui seberapa baik kinerja perusahaan dalam mengelola aset dalam rangka menghasilkan laba. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aset.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

#### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

## 1. Pendapatan Islam

Pendapatan Islam adalah pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional utama lainnya dari Bank Syariah yang berasal dari transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Dalam PSAK No. 59 dijelaskan bahwa pendapatan yang sesuai dengan prinsip Islam pada Bank Syariah yaitu, pendapatan dari akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan pendapatan utama lainnya. Menurut Hameed et al (2004) prinsip-prinsip syariah melarang transaksi yang melibatkan *riba*, *gharar* dan perjudian tetapi mendorong transaksi yang halal. Sehingga perbankan hanya diperbolehkan mendapatkan pendapatan yang halal. Pendapatan Islam adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan atau aktivitas yang diperbolehkan dalam syariat Islam yang mana pendapatan tersebut dikatakan halal. Pendapatan yang dikatakan halal sesuai prinsip Islam adalah pendapatan yang tidak mengandung adanya *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pendapatan Islam sesuai yang dikemukakan oleh Hameed et al (2004). Rumus ini juga telah digunakan pada penelitian sejenis yang dilakukan oleh Meilani (2015), Antonio (2012), dan Falikhatun (2012).

$$\text{Pendapatan Halal} = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Total Pendapatan}}$$

## 2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Rasio pengelolaan zakat merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui pemenuhan prinsip Islam pada perbankan syariah.

Prinsip tersebut adalah prinsip yang mengharuskan perbankan syariah untuk melakukan pengelolaan atas zakat, *infaq*, dan *shadaqah*.

Menurut Hameed et al (2004), rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio zakat adalah dengan membandingkan jumlah zakat dan total aktiva bersih yang dimiliki perbankan syariah. Rumus tersebut juga telah digunakan pada penelitian sejenis yang dilakukan oleh Meilani (2015), Antonio (2012), dan Falikhatun (2012).

$$\text{Pengelolaan Zakat} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Total Aktiva Bersih}}$$

### 3. Dewan Komisaris

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang Dewan Komisaris tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Jika jumlah anggota Dewan Komisaris pada bank syariah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia, yaitu minimal 3 anggota maka diberi nilai 1 dan jika sebaliknya diberi nilai 0.

#### 4. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk pada bank syariah atau bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah dengan tujuan untuk memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Menurut *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), Dewan Pengawas Syariah paling tidak terdiri dari tiga anggota cendekiawan syariah. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang menetapkan bahwa anggota DPS sekurang-sekurangnya sebanyak 2 (dua) orang dan maksimal sebanyak 50% dari jumlah Direksi. Apabila jumlah anggota DPS pada bank syariah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia yaitu minimal 2 anggota maka diberi nilai 1, sebaliknya jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka diberi nilai 0.

#### 3.4 Perumusan Model

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda menggunakan alat bantu dengan program SPSS versi 20. Analisis regresi merupakan suatu alat statistik yang memberikan penjelasan mengenai pola hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Persamaan Regresi:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan dengan proksi ROA

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$	= Koefisien Regresi
$X_1$	= Pendapatan Islam
$X_2$	= Pengelolaan Zakat
$X_3$	= Dewan Komisaris
$X_4$	= Dewan Pengawas Syariah
$e$	= <i>error</i>

### 3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Data dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan alat-alat analisis sebagai berikut:

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik variabel-variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif dilakukan dengan melihat keterkaitan hubungan dari data berupa angka-angka dan dapat diukur yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari variabel independen terhadap variabel independen. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi umum dari variabel penelitian, yaitu mengenai *central tendency* yaitu nilai rata-rata (mean), dan ukuran dispersi yaitu standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Penelitian ini juga menggunakan metode *content analysis* dengan cara membaca dan menganalisis laporan tahunan perusahaan. Kemudian informasi yang didapatkan tersebut dilakukan scoring.



### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Semua data yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan model regresi berganda harus memenuhi uji asumsi klasik. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari estimasi hasil yang bias.

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah bentuk pengujian untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik merupakan model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik merupakan model yang tidak terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2013).

#### 3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel pada periode tertentu dengan variabel periode sebelumnya. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan

uji Durbin-Watson, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson. Apabila berada pada kriteria  $D_u - (4-D_u)$  maka tidak menunjukkan adanya autokorelasi. (Ghozali, 2013).

#### 4. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik merupakan model homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan uji *Glejser*. Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen maka terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk memutuskan menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi.

#### 1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi yang akan digunakan. Hasil yang ditunjukkan memberikan gambaran seberapa besar variabel dependen akan mampu dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## 2. Uji Pengaruh Simultan (*F Test*)

Uji pengaruh simultan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan (Ghozali, 2013). Jika nilai sig. kurang dari 0,05 maka kelima variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

## 3. Uji Parsial (*T Test*)

Uji parsial dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Jika hasil uji menunjukkan nilai sig. kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai sig. lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis Deskriptif

##### 4.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Pendapatan Islam, Pengelolaan Zakat, dan Kinerja Keuangan (ROA)

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dari variabel yang diteliti, diantaranya mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Hasil analisis deskriptif dapat diketahui melalui penjelasan berikut:

**Tabel 4.1**

##### **Analisis Deskriptif**

	<b>Minimal</b>	<b>Maksimal</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Standar Deviasi</b>
Pendapatan Islam	0,81	1,00	0,916	0,057
Pengelolaan Zakat	0,01	0,10	0,047	0,026
ROA	-2,03	3,81	1,956	1,214

Hasil analisis deskriptif tersebut menginformasikan bahwa pendapatan Islam pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015 minimum sebesar 0,81 point dan maksimum sebesar 1 point. Rata-rata pendapatan Islam pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015 sebesar 0,916 point dengan simpangan baku sebesar 0,057 point. Hal ini berarti pendapatan Islam pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015 memusat diangka 0,916 point dengan penyimpangan sebesar 0,057 point.

Kemudian pengelolaan zakat pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015 minimum sebesar 0,01 point dan maksimum sebesar 0,10 point. Rata-rata pengelolaan zakat pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015 sebesar 0.047 point dengan simpangan baku sebesar 0,026 point. Hal ini berarti pengelolaan

zakat pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015 memusat diangka 0,047 point dengan penyimpangan sebesar 0,026 point.

Selanjutnya ROA pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015 minimum sebesar -2,03 point dan maksimum sebesar 3,81 point. Rata-rata ROA pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015 sebesar 1,956 point dengan simpangan baku sebesar 1,214 point. Hal ini berarti ROA pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015 memusat diangka 1,956 point dengan penyimpangan sebesar 1,214 point.

#### 4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Dewan Komisaris

**Tabel 4.2**

##### **Analisis Deskriptif Dewan Komisaris**

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Kurang dari 3 anggota	3	6,7%
Minimal 3 anggota	42	93,3%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas, dari 45 sampel Bank Umum Syariah periode 2011-2015, paling banyak 93,3% bank mempunyai Dewan Komisaris minimal 3 anggota. Sedangkan 6,7% Bank Umum Syariah periode 2011-2015 merupakan bank yang mempunyai Dewan Komisaris kurang dari 3 anggota.

#### 4.1.3 Analisis Deskriptif Variabel DPS

**Tabel 4.3**

##### **Analisis Deskriptif Dewan Pengawas Syariah**

<b>Dewan Pengawas Syariah</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Tidak Memenuhi	1	2,2%
Minimal 2 anggota	44	97,8%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut, dari 45 sampel Bank Umum Syariah periode 2011-2015, paling banyak 97,8% bank mempunyai DPS minimal 2 anggota.

Sedangkan 2,2% Bank Umum Syariah periode 2011-2015 merupakan bank yang tidak memenuhi minimal memiliki 2 anggota DPS.

#### **4.2 Analisis Pengaruh Variabel Pendapatan Islam, Pengelolaan Zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap Variabel Kinerja Keuangan (ROA)**

Analisis pengaruh variabel pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap variabel kinerja keuangan (ROA) dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel *dummy*. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap variabel kinerja keuangan (ROA).

##### **4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik**

###### **4.2.1.1 Asumsi Multikolinieritas**

Pengujian multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen. Pada analisis regresi linier tidak diperbolehkan adanya hubungan antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) atau tolerance masing-masing variabel independen.

Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 atau nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 maka dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinier. Adapun ringkasan hasil VIF dan Tolerance sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Tabel Collinearity Statistics – Pengujian Multikolinieritas**

Independent Variable	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pendapatan Islam	0,984	1,016
Pengelolaan Zakat	0,988	1,012
Dewan Komisaris	0,993	1,007
Dewan Pengawas Syariah	0,979	1,021

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat diketahui semua variabel independen menghasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Dengan demikian analisis regresi pada penelitian ini dinyatakan tidak mengandung gejala multikolinier.

#### 4.2.1.2 Asumsi Normalitas

Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Pada analisis regresi linier diharapkan residual berdistribusi normal. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui pengujian Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis pengujian asumsi normalitas adalah sebagai berikut :

H0 : Residual berdistribusi normal

H1 : Residual tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian menyatakan apabila probabilitas yang dihasilkan dari pengujian Kolmogorov-Smirnov  $\geq$  level of significant ( $\alpha=5\%$ ) maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi normalitas melalui pengujian Kolmogorov-Smirnov:

**Tabel 4.5**  
**Tabel Kolmogorov Smirnov – Pengujian Normalitas**

	Kinerja Keuangan (ROA)
Kolmogorov-Smirnov Z	0,737
Probabilitas	0,649

Pengujian asumsi normalitas pengaruh pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap variabel kinerja keuangan (ROA) menghasilkan statistik uji *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,737 dengan probabilitas sebesar 0,649. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas  $> \text{level of significant}$  ( $\alpha=5\%$ ), sehingga  $H_0$  diterima. Hal ini berarti residual dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.

#### **4.2.1.3 Asumsi Heteroskedastisitas**

Pengujian asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki ragam yang homogen atau tidak. Pada analisis regresi linier diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. Pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilihat melalui *Glejser Test*. Hipotesis pengujian asumsi heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Residual memiliki ragam homogen

$H_1$  : Residual tidak memiliki ragam homogen

Kriteria pengujian menyatakan apabila probabilitas yang dihasilkan dari pengujian *Glejser*  $\geq \text{level of significant}$  ( $\alpha=5\%$ ) maka residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas melalui *Glejser Test*:



**Tabel 4.7**  
**Tabel Glejser Test – Pengujian Heteroskedastisitas**

Independent Variable	T statistic ( <i>Glejser Test</i> )	Probability
Pendapatan Islam	-0,495	0,623
Pengelolaan Zakat	-0,353	0,726
Dewan Komisaris	0,768	0,447
Dewan Pengawas Syariah	1,078	0,287

Pengujian asumsi heteroskedastisitas menunjukkan bahwa probabilitas untuk semua variabel *>level of significant* ( $\alpha=5\%$ ). Hal ini berarti residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Dengan demikian asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

#### 4.2.1.4 Asumsi Autokorelasi

Pengujian asumsi autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah observasi/series residual saling berkorelasi atau tidak. Pengujian asumsi autokorelasi diharapkan observasi residual tidak saling berkorelasi. Pengujian asumsi autokorelasi dilakukan menggunakan uji *Durbin Watson*. Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai uji *Durbin Watson* (DW) berada pada nilai  $dU - (4-dU)$  maka persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi atau residual tidak saling berkorelasi atau berhubungan. Kriteria pengujian autokorelasi dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 4.8**  
**Tabel Durbin Watson– Pengujian Autokorelasi**

Nilai DW		Keterangan
$<dL$	$< 1,336$	Ada Autokorelasi
$dL - dU$	$1,336 - 1,720$	Tidak ada kesimpulan
$dU - (4-dU)$	$1,720 - 2,280$	Tidak ada Autokorelasi
$(4-dU) - (4-dL)$	$2,280 - 2,664$	Tidak ada kesimpulan
$>(4-dU)$	$> 2,280$	Ada Autokorelasi

Berdasarkan ringkasan pada tabel tersebut didapatkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,781, dimana nilai tersebut berada pada kriteria  $dU - (4-dU)$ . Dengan demikian residual yang dihasilkan dari persamaan regresi yang telah diestimasi dinyatakan tidak ada autokorelasi.

#### 4.2.2 Pengujian Koefisien Determinasi

Hasil pengujian pengaruh variabel pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap variabel kinerja keuangan (ROA) dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 4.9**  
**Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variable	Coefficient	Standardized Coefficient	Tstatistic	Prob
Konstanta	-1,923		-2,268	0,029
Pendapatan Islam	2,539	0,216	2,034	0,049
Pengelolaan Zakat	4,480	0,323	3,043	0,004
Dewan Komisaris	0,059	0,044	0,414	0,681
DPS	1,474	0,642	6,029	0,000
<i>F</i> statistic = 12,508		Prob = 0,000 <sup>b</sup>		
R-squared = 0,556		Adj. R-squared = 0,511		

Besarnya kontribusi variabel pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap variabel kinerja keuangan (ROA) dapat diketahui melalui koefisien determinasinya ( $\text{adj } R^2$ ) yaitu sebesar 0,511. Hal ini berarti keragaman variabel kinerja keuangan (ROA) dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan DPS sebesar 51,1; atau dengan kata lain kontribusi variabel pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap variabel kinerja keuangan (ROA) sebesar 51,1%, sedangkan sisanya sebesar 48,9% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

### 4.2.3 Pengujian Hipotesis

#### 4.2.3.1 Uji Hipotesis Simultan

Pengujian hipotesis simultan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap variabel kinerja keuangan (ROA). Kriteria pengujian menyatakan jika nilai  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  atau probabilitas  $< level\ of\ significance\ (\alpha)$  maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel Pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap variabel kinerja keuangan (ROA). Pengujian hipotesis secara simultan menghasilkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 12,508 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas  $< level\ of\ significance\ (\alpha=5\%)$ . Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) variabel Pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap variabel kinerja keuangan (ROA).

#### 4.2.3.2 Uji Hipotesis Parsial

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap variabel kinerja keuangan (ROA). Kriteria pengujian menyatakan jika nilai  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  atau probabilitas  $< level\ of\ significance\ (\alpha)$  maka terdapat pengaruh signifikan secara individu pengaruh variabel pendapatan Islam terhadap variabel kinerja keuangan (ROA), variabel pengelolaan zakat terhadap variabel kinerja keuangan (ROA), variabel Dewan Komisaris terhadap variabel kinerja keuangan (ROA), dan variabel DPS terhadap variabel kinerja keuangan (ROA).

**a. Uji Hipotesis *Parsial* antara Variabel Pendapatan Islam terhadap Variabel Kinerja Keuangan (ROA)**

Pengujian hipotesis secara parsial variabel Pendapatan Islam menghasilkan nilai  $t$  hitung sebesar 2,034 dengan probabilitas sebesar 0,049. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas  $< \text{level of significance}$  ( $\alpha=5\%$ ). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel Pendapatan Islam terhadap variabel kinerja keuangan (ROA).

**b. Uji Hipotesis *Parsial* antara Variabel Pengelolaan Zakat terhadap Variabel Kinerja Keuangan (ROA)**

Pengujian hipotesis secara parsial variabel pengelolaan zakat menghasilkan nilai  $t$  hitung sebesar 3,043 dengan probabilitas sebesar 0,004. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas  $< \text{level of significance}$  ( $\alpha=5\%$ ). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel pengelolaan zakat terhadap variabel kinerja keuangan (ROA).

**c. Uji Hipotesis *Parsial* antara Variabel Dewan Komisaris terhadap Variabel Kinerja Keuangan (ROA)**

Pengujian hipotesis secara parsial variabel Dewan Komisaris menghasilkan nilai  $t$  hitung sebesar 0,414 dengan probabilitas sebesar 0,681. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas  $> \text{level of significance}$  ( $\alpha=5\%$ ). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel Dewan Komisaris terhadap variabel kinerja keuangan (ROA).

**d. Uji Hipotesis *Parsial* antara Variabel DPS terhadap Variabel Kinerja Keuangan (ROA)**

Pengujian hipotesis secara parsial variabel DPS menghasilkan nilai t hitung sebesar 6,029 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas *<level of significance* ( $\alpha=5\%$ ). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel DPS terhadap variabel kinerja keuangan (ROA).

**e. Uji Hipotesis *Parsial* antara Konstanta terhadap Variabel Kinerja Keuangan (ROA)**

Pengujian hipotesis secara parsial variabel konstanta menghasilkan nilai t hitung sebesar -2,268 dengan probabilitas sebesar 0,029. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas *<level of significance* ( $\alpha=5\%$ ). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan secara parsial konstanta terhadap variabel kinerja keuangan (ROA).

**4.2.3.3 Model Empirik Regresi Linier Berganda**

Persamaan regresi dari hasil estimasi analisis regresi linier berganda adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$ROA = -1,923 + 2,539X_1 + 4,480X_2 + 0,059X_3 + 1,474X_4 + \varepsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar -1,923 mengindikasikan bahwa apabila variabel pendapatan Islam, pengelolaan zakat, Dewan Komisaris, dan DPS bernilai konstan (tidak berubah) maka besarnya perubahan variabel kinerja keuangan (ROA) sebesar -1,923.

2. Koefisien variabel pendapatan Islam sebesar 2,539 mengindikasikan bahwa variabel pendapatan Islam berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan (ROA). Hal ini berarti meningkatnya pendapatan Islam sebesar 1 point maka dapat meningkatkan kinerja keuangan (ROA) sebesar 2,53%.
3. Koefisien variabel pengelolaan zakat sebesar 4,480 mengindikasikan bahwa variabel pengelolaan zakat berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan (ROA). Hal ini berarti meningkatnya pengelolaan zakat sebesar 1 point maka dapat menurunkan kinerja keuangan (ROA) sebesar 4,48%.
4. Koefisien variabel Dewan Komisaris sebesar 0,059 mengindikasikan bahwa bank dengan banyaknya anggota Dewan Komisaris minimal 3 anggota mampu meningkatkan kinerja keuangan (ROA) 0,059 kali lebih besar dibandingkan bank dengan banyaknya anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 anggota. Namun peningkatan tersebut tidak signifikan.
5. Koefisien variabel Dewan Pengawas Syariah sebesar 1,474 mengindikasikan bahwa bank dengan anggota DPS yang memenuhi kriteria minimal 2 anggota mampu meningkatkan kinerja keuangan (ROA) 1,474 kali lebih besar dibandingkan bank dengan anggota DPS kurang dari 2 anggota.

#### **4.2.4 Pembahasan Hasil Hipotesis**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis menggunakan uji statistik, diperoleh kesimpulan terhadap 4 hipotesis penelitian untuk menganalisis faktor kepatuhan syariah dan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hasil hipotesis penelitian dijelaskan berikut ini:

**Tabel 4.10**  
**Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis**

No.	Hipotesis	Koefisien	T	Sig.	Keterangan	Kesimpulan
1	H1	2,539	2,034	0,049	Signifikan	Diterima
2	H2	4,480	3,043	0,004	Signifikan	Diterima
3	H3	0,059	0,414	0,681	Tidak Signifikan	Ditolak
4	H4	1,474	6,029	0,000	Signifikan	Diterima

#### **4.2.4.1 Pengaruh Pendapatan Islam terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah**

Berdasarkan pengujian hipotesis 1, penelitian ini dapat membuktikan bahwa pendapatan Islam dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun (2012) dan Meilani (2015). Penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara pendapatan Islam terhadap kinerja keuangan.

Pendapatan Islam yang tinggi mengindikasikan bahwa perbankan syariah tersebut telah menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip Islam sesuai pada Pasal 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Peraturan tersebut mengatur mengenai aktivitas perbankan yang berbasis syariah harus tunduk dan patuh pada fatwa DSN-MUI. Salah satu aktivitas perbankan syariah yang dianjurkan oleh DSN-MUI adalah aktivitas yang berfokus pada Pendapatan Islam sesuai dengan prinsip Islam.

Sesuai dengan teori *Shariah Enterprise Theory*, perbankan syariah diharapkan tidak hanya berfokus kepada pemenuhan kepentingan *stockholders* saja tetapi juga pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Salah satu hal yang perlu untuk dimiliki oleh perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas operasinya yakni kepatuhan syariah termasuk di dalamnya pendapatan yang berasal dari aktivitas halal.

Semakin baik tingkat pendapatan Islam dalam perbankan syariah, maka semakin baik kinerja keuangan bank syariah.

#### **4.2.4.2 Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis 2, penelitian ini dapat membuktikan bahwa pengelolaan zakat dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ilmi (2011). Namun penelitian ini sesuai dengan Sidik & Reskino (2016), serta Amirah & Raharjo (2014) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Tingginya pengelolaan zakat dapat menyebabkan peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah.

Sesuai dengan *Shariah Enterprise Theory*, perbankan syariah tidak hanya berfokus pada pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi perbankan syariah diharapkan juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Salah satu cara yang dapat digunakan pada perbankan syariah yaitu dengan menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak. Perbankan syariah dengan tingkat pengelolaan zakat yang tinggi mengindikasikan bahwa perbankan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik karena dalam hal ini bank syariah berhasil menjalankan strategi marketing guna menarik minat nasabah untuk menginvestasikan dananya di bank syariah, sebagaimana menurut Foote (2010) dalam Amirah & Raharjo (2014).



#### **4.2.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis 3, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa Dewan Komisaris dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah secara signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksana (2015) yang menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengaruh positif tidak signifikan pada penelitian ini mengindikasikan bahwa Dewan Komisaris belum dapat berfungsi secara efektif sebagai alat untuk memonitor manajemen dalam meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Sehingga keberadaan Dewan Komisaris belum dapat memberikan dampak terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah. Selain itu, Sylvia dan Siddharta (2005) juga menyatakan bahwa pengangkatan Dewan Komisaris oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance* (GCG) di dalam perusahaan.

#### **4.2.4.4 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis 4, penelitian ini dapat membuktikan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini tidak sesuai

dengan penelitian Ilhami (2009) yang menunjukkan bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rama (2015). Penelitian tersebut menyatakan bahwa DPS berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini memiliki hasil yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara DPS dan kinerja keuangan, artinya semakin besar DPS yang terdapat pada bank syariah maka semakin baik kinerja keuangan perbankan syariah tersebut. Kinerja keuangan suatu perusahaan ditentukan oleh sejauhmana keseriusan perusahaan menerapkan *good corporate governance*. Secara hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan penerapan GCG dengan indikator Dewan Pengawas Syariah (DPS) bermanfaat untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Menurut Chtourou, dkk (2001) dalam Dewayanto (2010) menyatakan bahwa jumlah dewan yang besar akan meningkatkan *monitoring* terhadap manajemen perusahaan. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan tersebut akan meminimalisir penggunaan dana dalam aktivitas yang tidak berprinsip pada syariah sehingga dapat mengurangi kinerja keuangan. Pada akhirnya, kinerja keuangan perbankan syariah akan meningkat sejalan dengan *monitoring* yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh pendapatan Islam dan pengelolaan zakat serta faktor *corporate governance* yakni Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kinerja keuangan perbankan yang diproksikan dengan *Return On Assets (ROA)* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan Islam dan pengelolaan zakat merupakan faktor komponen kepatuhan syariah yang mempunyai pengaruh positif dengan kinerja keuangan. Sedangkan variabel Dewan Pengawas Syariah merupakan satu-satunya komponen *corporate governance* pada penelitian ini yang mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Faktor kepatuhan syariah dan *corporate governance* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return On Assets (ROA)*. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan syariah dan *corporate governance* merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah dan *corporate governance*, maka semakin baik kinerja keuangan perbankan syariah tersebut.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sehingga belum mencakup semua industri perbankan syariah lainnya dan tidak dapat digeneralisasi.
2. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya berlangsung selama 5 tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2015, dan sampel yang sedikit yaitu sebanyak sembilan Bank Umum Syariah. Sehingga penelitian ini belum bias secara maksimal menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan syariah.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah nilai keofisien determinasi ( $\text{adjusted } R^2$ ), penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang secara teoritis mampu mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan syariah, misal rasio bagi hasil dan kepemilikan institusional.
2. Penggunaan sampel sebaiknya lebih luas tidak hanya Bank Umum Syariah saja tetapi bisa dengan menambahkan sampel Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat digeneralisir pada semua industri perbankan syariah yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirah., & Raharjo, T. B. (2014). Pengaruh Alokasi Dana Zakat terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. FEB UMS: Seminar Nasional dan Call for Paper
- Antonio, Muhammad Syafii., Sanrego, Y., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: *Maqashid* Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*. Vol. 1, No. 1, pp. 012 – 029
- Bank Indonesia, (2004). *Statistik Perbankan Syariah Desember 2015*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia
- Dewayanto, Totok. (2010). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008. *Fokus Ekonomi*. Vol. 5 No. 2. p. 104-123
- Falikhatun. (2012). Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan pada Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial. *Proceedings of Conference in Business, Accounting and Management (CBAM)*. Vol. 1, No. 1, Desember 2012, Hal. 245-254.
- Faozan, Akhmad. (2015). Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 49, No. 2, Desember 2015, Hal. 338-355
- Febianto, Irawan. (2011) Analisis Laporan Tahunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Nominal*, No.3, Vol. 1, Desember 2011
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP UNDIP.
- Hameed, Shahul., Ade, W., Bakhtiar, A., Mohd, N., & Sigit, P. (2004). Alternative Disclosure and Performance for Islamic Bank's. *Proceeding of the Second Conference on Administrative Science: Meeting the Challenges of the Globalization Age*. Dahrnan, Saud Arabia.
- Ilhami, Haniah. (2009). Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah. *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3, Hal 409 – 628
- Ilmi, Muhammad Bahrul. (2011). Pengaruh Zakat sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Graduasi*, Vol. 26 Edisi November 2011

- Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999, Tentang Pengertian, Asas, Tujuan dan Organisasi Pengelolaan Zakat. Diakses dari <https://sultra.kemenag.go.id/files/sultra/file/dokumen/KMANo.373Tahun2003TentangPengelolaanZakat.pdf>
- KNKG. (2012). Komite Nasional Kebijakan Governance – Prinsip Dasar Pedoman GCG Perbankan Indonesia. Diakses dari <http://www.knkg-indonesia.com>
- Kuppusamy, Mudiarasan., Ali Salma Saleh., & Ananda Samudhram. (2010). Measurement of Islamic Banks Performance Using Shari'a Conformity and Profitability Model. *International Association for Islamic Economics and Review of Islamic Economics*. Vol. 13, No. 2, Pp. 35 – 48
- Laksana, Jaya. (2015). *Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012). Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana
- Meilani, Sayekti Endah Retno. (2015). Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia. FEB UMS: Seminar Nasional dan The 2nd Call For Syariah Paper
- Muhammad.(2011). Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press
- Mulyadi. (2007). Sistem Akuntansi. Jakarta :Salemba Empat
- OECD. (2004). *OECD Principle of Corporate Governance*. Diakses dari <http://www.oecd.org/daf/governance/principle/html>
- OJK. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 8 Desember 2014 (“POJK No.34”). Diakses dari [http://www.ptba.co.id/public/uploads/POJK\\_No\\_34-POJK\\_04-2014\\_-\\_Komite\\_Remunerasi\\_dan\\_Nominasi.pdf](http://www.ptba.co.id/public/uploads/POJK_No_34-POJK_04-2014_-_Komite_Remunerasi_dan_Nominasi.pdf)
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Prinsip – Prinsip GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diakses dari [http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/PBI\\_71209.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/PBI_71209.aspx)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/ 3 /PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Diakses dari [http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi\\_110309.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_110309.aspx)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

- Prasojo. (2015). Pengaruh Penerapan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi* Vol. 2, No. 1, Maret 2015, Hal. 59-69
- PSAK No. 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Diakses dari <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas>
- Puspitasari, Filia., & Endang Ernawati. (2010). Pengaruh Mekanisme GCG terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2010
- Rama, Ali., & Yella Novela. (2015). Syariah Governance dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah. *Jurnal Signifikan*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2015
- Scott, W. R. (2012). *Financial Accounting Theory 6<sup>th</sup> Edition*. Toronto: Pearson Education Canada
- Siallagan, Hamonangan., & Mas'ud Machfoedz. (2006). Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Padang: Simposium Nasional Akuntansi 9
- Sidik, Ichwan., & Reskino. (2016). Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja. Padang: Simposium Nasional Akuntansi XIX
- Siregar, Sylvia Veronica N.P dan Siddharta Utama. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Praktek *Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Laba. Disampaikan dalam *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII*. Solo.
- Sucipto. (2003). Penilaian Kinerja Keuangan.” *Jurnal Akuntansi*. Universitas Sumatra Utara. Medan
- Sukandar, Panky Pradana., & Rahardja. (2014). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Diponegoro*. Vol. 3, No. 3, Hal. 1-7
- Syakhroza, Akhmad. (2003). Best Practices Corporate dalam konteks kondisi local Perbankan Indonesia,” *Majalah Usahawan*, Tahun XXXIII, No.6, Juni 2003
- Triyuwono, Iwan. (2012). *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ujiyantho, M.A. & Pramuka, B.A. (2007). Mekanisme Corporate Governance Manajemen dan Kinerja Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1-26
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Diakses dari [http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-i/Documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-i/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Diakses dari <http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang%20No%2023%20Tahun%202011%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf>

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Diakses dari <http://prokum.esdm.go.id/uu/2007/uu-40-2007.pdf>

Widyaningdyah, Agnes Utari. (2001). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Earning Management pada Perusahaan Go Public di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. No. 2, Vol. 3, Hal. 89 – 101



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Daftar Sampel Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah		Website
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia	<a href="http://www.bankmuamalat.co.id">www.bankmuamalat.co.id</a>
2.	PT. Bank Victoria Syariah	<a href="http://www.bankvictoriasyariah.co.id">www.bankvictoriasyariah.co.id</a>
3.	PT. Bank Syariah BRI	<a href="http://www.brisyariah.co.id">www.brisyariah.co.id</a>
4.	PT. Bank Syariah BNI	<a href="http://www.bnisyariah.co.id">www.bnisyariah.co.id</a>
5.	PT. Bank Syariah Mandiri	<a href="http://www.banksyariahmandiri.co.id">www.banksyariahmandiri.co.id</a>
6.	PT. Bank Syariah Mega Indonesia	<a href="http://www.megasyariah.co.id">www.megasyariah.co.id</a>
7.	PT. Bank Panin Syariah	<a href="http://www.paninbanksyariah.co.id">www.paninbanksyariah.co.id</a>
8.	PT. BCA Syariah	<a href="http://www.bcasyariah.co.id">www.bcasyariah.co.id</a>
9.	PT. Maybank Indonesia Syariah	<a href="http://www.maybanksyariah.co.id">www.maybanksyariah.co.id</a>

## Lampiran 2

### Data Pendapatan Islam (X1)

<b>Nama Perbankan Syariah</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
BCA Syariah	0,92	0,87	0,83	0,91	0,98
BNI Syariah	0,96	0,96	0,96	0,94	1,00
BRI Syariah	0,83	0,93	0,91	0,85	0,89
Mandiri Syariah	0,96	0,98	0,96	0,86	0,91
Maybank	0,94	0,94	0,91	0,87	0,88
Mega Syariah	0,99	0,96	0,99	0,84	0,84
Muamalat	0,95	0,87	0,82	0,97	0,86
Panin Syariah	0,97	0,98	0,81	1,00	1,00
Victoria	0,91	0,88	0,86	0,95	0,83

### Lampiran 3

#### Data Pengelolaan Zakat (X2)

<b>Nama Perbankan Syariah</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
BCA Syariah	0,02	0,08	0,02	0,07	0,03
BNI Syariah	0,03	0,04	0,06	0,03	0,04
BRI Syariah	0,04	0,07	0,07	0,05	0,02
Mandiri Syariah	0,05	0,01	0,04	0,06	0,07
Maybank	0,01	0,06	0,09	0,10	0,06
Mega Syariah	0,08	0,09	0,05	0,02	0,08
Muamalat	0,07	0,04	0,02	0,01	0,04
Panin Syariah	0,09	0,03	0,09	0,05	0,03
Victoria	0,06	0,05	0,01	0,01	0,01

## Lampiran 4

### Data Dewan Komisaris (X3)

<b>Nama Perbankan Syariah</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
BCA Syariah	1	0	1	1	1
BNI Syariah	1	1	1	1	0
BRI Syariah	1	1	1	1	1
Mandiri Syariah	1	1	0	1	1
Maybank	1	1	1	1	1
Mega Syariah	1	1	1	1	1
Muamalat	1	1	1	1	1
Panin Syariah	1	1	1	1	1
Victoria	1	1	1	1	1

## Lampiran 5

### Data Dewan Pengawas Syariah (X4)

<b>Nama Perbankan Syariah</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
BCA Syariah	1	1	1	1	1
BNi Syariah	1	1	1	1	1
BRI Syariah	1	1	1	1	1
Mandiri Syariah	1	1	1	1	1
Maybank	1	1	1	1	0
Mega Syariah	1	1	1	1	1
Muamalat	1	1	1	1	1
Panin Syariah	1	1	1	1	1
Victoria	1	1	1	1	1

## Lampiran 6

### Data *Return On Assets* (ROA)

<b>Nama Perbankan Syariah</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
BCA Syariah	0,90	0,80	1,00	0,80	1,26
BNI Syariah	1,29	1,48	1,37	1,27	1,43
BRI Syariah	0,91	1,19	1,15	0,80	0,76
Mandiri Syariah	1,95	2,25	1,53	0,17	0,56
Maybank	2,57	2,35	2,87	3,61	-2,03
Mega Syariah	1,58	3,81	2,33	0,29	0,30
Muamalat	3,58	1,54	2,37	0,32	0,75
Panin Syariah	2,82	3,48	1,03	1,99	1,14
Victoria	2,65	2,17	0,50	-1,07	-1,02

## Lampiran 7

### Analisis Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Islam	45	.81	1.00	.9162	.05718
Pengelolaan Zakat	45	.01	.10	.0478	.02636
Valid N (listwise)	45				

**Dewan Komisaris**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
kurang dari 3 anggota	3	6.7	6.7	6.7
Valid minimal 3 anggota	42	93.3	93.3	100.0
Total	45	100.0	100.0	

**Dewan Pengawas Syariah**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tidak memenuhi	1	2.2	2.2	2.2
Valid minimal 2 anggota	44	97.8	97.8	100.0
Total	45	100.0	100.0	

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	45	-2.03	3.81	1.3956	1.21460
Valid N (listwise)	45				

**Lampiran 8. Pengujian Pengaruh Pendapatan Islam, Pengelolaan Zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap Kinerja Keuangan (ROA)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.745 <sup>a</sup>	.556	.511	.23923	1.781

a. Predictors: (Constant), DPS, Dewan Komisaris, Pengelolaan Zakat, Pendapatan Islam

b. Dependent Variable: ROA

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.863	4	.716	12.508	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2.289	40	.057		
	Total	5.153	44			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), DPS, Dewan Komisaris, Pengelolaan Zakat, Pendapatan Islam

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1.923	.848		-2.268	.029
Pendapatan Islam	2.539	1.248	.216	2.034	.049
1 Pengelolaan Zakat	4.480	1.472	.323	3.043	.004
Dewan Komisaris	.059	.143	.044	.414	.681
DPS	1.474	.245	.642	6.029	.000

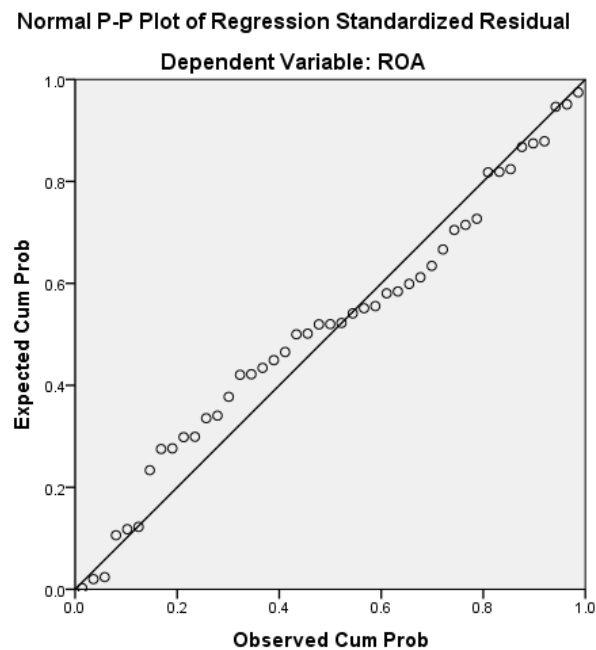
a. Dependent Variable: ROA



## Lampiran 9. Asumsi Pengaruh Pendapatan Islam, Pengelolaan Zakat, Dewan Komisaris, dan DPS terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

### Asumsi Normalitas

#### Normal Probability Plot



### Kolmogorov Smirnov

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.22809626
	Absolute	.110
Most Extreme Differences	Positive	.072
	Negative	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		.737
Asymp. Sig. (2-tailed)		.649

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Asumsi Multikolinieritas

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
(Constant)	.029		
1 Pendapatan Islam	.049	.984	1.016
Pengelolaan Zakat	.004	.988	1.012
Dewan Komisaris	.681	.993	1.007
DPS	.000	.979	1.021

### Asumsi Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.745 <sup>a</sup>	.556	.511	.23923	1.781

a. Predictors: (Constant), DPS, Dewan Komisaris, Pengelolaan Zakat, Pendapatan Islam

b. Dependent Variable: ROA

### Asumsi Heteroskedastisitas

#### Glejser Test

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.209	.570		.366	.717
1 Pendapatan Islam	-.415	.839	-.077	-.495	.623
Pengelolaan Zakat	-.350	.990	-.055	-.353	.726
Dewan Komisaris	.074	.096	.119	.768	.447
DPS	.177	.164	.168	1.078	.287

a. Dependent Variable: abs3

## Scatter Plot

